

## **URGENSI MANAJEMEN DALAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING**

**Lia Mita Syahri<sup>1\*</sup>, Tri Handani<sup>2</sup>, Afriza Media<sup>3</sup>, Syahrial<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Padang, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Bung Hatta, Indonesia

\*Email: [liamitasyahri@unp.ac.id](mailto:liamitasyahri@unp.ac.id) , [liasyahri58@gmail.com](mailto:liasyahri58@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Permasalahan terkait dengan manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah masih ditemukan dari berbagai sudut permasalahan, hal ini menggambarkan berdasarkan fenomena yang terjadi antara lain, tugas guru bimbingan dan konseling yang tidak sesuai, aturan terkait siswa asuh guru bimbingan dan konseling, pelaksanaan dari segi waktu bimbingan konseling di sekolah, sehingga permasalahan yang terjadi ini dapat membuat pelaksanaan manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak sesuai dengan tujuan atau visi misi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Maka dari itu perlu aturan yang berlaku dan struktur pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang sistematis menggunakan konsep manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan secara naratif terkait urgensi/pentingnya manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Metode penelitian yang digunakan yakni tinjauan Pustaka (*literature review*) dengan metode naratif. Hasil pembahasan bahwasanya pelaksanaan manajemen pelayanan bimbingan dan konseling perlu menggunakan prinsip-prinsip manajemen yakni POAC, kemudian didukung oleh kerjasama seluruh *stakeholder* sekolah dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Saran dari hasil penelitian ini, agar peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat menggunakan jenis penelitian lainnya dan menjelaskan hasil temuannya dengan metode lain yang relevan dengan tujuan penelitian.

**Kata kunci:** *Manajemen Pelayanan, Bimbingan Konseling, Guru*

### **PENDAHULUAN**

Bimbingan dan Konseling di sekolah merupakan bagian *integral* yang tidak dapat dipisahkan dalam struktur organisasi sekolah. Bimbingan dan Konseling menjadi satu kesatuan dalam upaya pemberian pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien bagi peserta didik di sekolah (Mutia, 2021). Bimbingan dan konseling (BK) dalam struktur

dan prosesnya perlu memberikan pelayanan terbaik kepada penerima layanannya yang disebut dengan klien/peserta didik, sedangkan bagi pemberi layanan BK disebut dengan Konselor/Guru BK.

Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang terstruktur dan terarah sesuai dengan aturan, norma, hukum yang berlaku, tentu dalam pelaksanaannya diperlukan penjelasan rangkaian sistem kerjanya, yang biasanya dapat ditemukan dalam bentuk manajemen pelayanan BK (Siraj, 2022).

Akan tetapi dalam kenyataannya, manajemen pelayanan BK yang dilaksanakan oleh Guru BK/Konselor di sekolah tidak seperti yang diharapkan, hal ini didukung oleh temuan Hidayat (2020) bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, hanya dapat dilaksanakan ketika ada jam kosong, kecuali untuk kelas XII diberikan waktu 1 jam dalam seminggu, untuk guru BK dapat masuk kelas memberikan materi layanan terkait studi sekolah lanjut, fenomena yang diungkapkan ini termasuk dalam jenis permasalahan manajemen dalam segi waktu untuk pelayanan bimbingan dan Konseling. Maka dengan demikian perlu konseling kelompok dilakukan sebagai proses pemberian bimbingan ( Taufik, 2021).

Selanjutnya berdasarkan temuan fenomena oleh Sinaga (2022) menjelaskan integrasi manajemen pelayanan BK yang masih minim diketahui oleh guru BK/Konselor, sehingga dukungan dari para stakeholder lainnya di lingkungan sekolah juga kurang memberikan dukungan dalam pelaksanaan layanan BK itu sendiri.

Zulkarnain (2022) menjelaskan bentuk minimnya manajemen pelayanan BK yang kurang diketahui oleh Guru BK dalam melaksanakan pelayanan BK seperti tidak memiliki program, memiliki pola pelayanan yang berbeda antar guru BK, tidak memiliki format baku atau panduan bagi guru BK dalam melaksanakan pelayanan BK di sekolah.

Selain itu permasalahan lainnya terkait manajemen pelayanan BK yang ditemukan di sekolah menurut Asni (2024) yakni sistem manajemen pelayanan BK yang dilaksanakan oleh guru BK, akan tetapi dalam menjalankannya tidak menggunakan unsur dan syarat pelaksanaan manajemen, yakni tidak menjalankan fungsi POAC dalam manajemen, hal ini dikarenakan dengan menggunakan fungsi POAC, maka pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah dapat berjalan secara matang dan sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan itu, pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, mudah mengelola berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Pada dasarnya, manajemen merupakan suatu bidang ilmu yang menjelaskan hakikat terait perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengawasan (*controlling*) terhadap struktur organisasi dalam mencapai tujuan lembaga, yang dalam hal ini khusus lembaga pendidikan (Setiawan, 2021).

Ketika manajemen pelayanan BK dapat dilaksanakan dengan menggunakan prinsip POAC, maka diharapkan manajemen yang dilaksanakan oleh guru BK dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran bagi peserta didik. Guru BK atau konselor sekolah (Mulyasa, 2022)

Selain pelaksanaan manajemen BK yang menggunakan prinsip POAC, disamping itu perlu kunci kerjasama dan kesungguhan pelaksana manajemen pelayanan BK dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling itu sendiri, kerjasama antar *stakeholder* pendidikan diperlukan, agar kegiatan pelayanan BK dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Manajemen Pelayanan BK di Sekolah**

Manajemen bimbingan dan konseling melibatkan segala usaha atau metode yang diterapkan untuk memanfaatkan secara maksimal semua elemen atau sumber daya, seperti tenaga kerja, dana, dan sarana prasarana, serta sistem informasi yang mencakup data bimbingan dan konseling, guna melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Umami, 2022).

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 diterbitkan sebagai pedoman baru untuk pelaksanaan tata kelola bimbingan dan konseling, mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan staf, kepemimpinan, dan pengendalian. (Zamroni & Rahardjo, 2015). Bimbingan dan konseling memiliki konsep dan peran yang ideal, karena jika berfungsi secara optimal, bimbingan dan konseling dapat menangani semua kebutuhan dan masalah siswa di sekolah dengan efektif. (Sumarto, 2024). Sebuah program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak dapat disusun, dilaksanakan, atau mencapai hasil yang diinginkan tanpa dikelola dalam sebuah sistem manajemen yang berkualitas.

Manajemen yang berkualitas tercermin dalam kemampuan manajer pendidikan di sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya yang tersedia. (Manik et al., 2023). Bimbingan dan konseling perlu dilakukan agar layanan ini benar-benar berkontribusi pada penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kegiatan ini harus didukung oleh manajemen yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling.

Dalam konteks manajemen, penerapan atau implementasi manajemen bimbingan dan konseling merupakan suatu aktivitas sistematis yang mencakup perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi bimbingan dan konseling, pengawasan pelaksanaan kegiatan, serta penilaian hasilnya. Oleh karena itu, implementasi manajemen bimbingan dan konseling di sekolah melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, dan pengawasan. (Afny, 2023).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Pendidikan Dasar dan Menengah memperkenalkan perspektif baru mengenai manajemen bimbingan dan konseling. Pengadopsian pola pelayanan bimbingan dan konseling yang komprehensif, yang dikombinasikan dengan pola 17 plus yang sudah lama diterapkan, membuat

beberapa pihak merasa bingung tentang pola mana yang harus diikuti.” (Habsy et al., 2024).

Dalam sebuah pertemuan ilmiah, Prof. Dr. Prayitno, M.Sc. Ed., yang merupakan Dewan Pembina ABKIN, menekankan bahwa konselor di lapangan tidak perlu bingung tentang pola mana yang harus digunakan. Yang penting adalah menguasai dan memilih pola yang paling sesuai dengan kondisi lapangan. Meskipun demikian, sebagai bagian dari pembaruan paradigma dalam pelayanan bimbingan dan konseling, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 telah menetapkan pola layanan sebagai acuan untuk pemberian layanan dan administrasi bimbingan dan konseling di sekolah. (Zamroni & Rahardjo, 2015).

## **B. Fungsi Manajemen Pelayanan BK di Sekolah**

Pendidikan memiliki fungsi pengembangan, membantu individu mengembangkan diri sesuai dengan fitrahnya (potensi), peragaman (*differensiasi*), membantu individu memilih arah perkembangan yang tepat sesuai dengan potensi dan integrasi, membawa keragaman perkembangan ke arah tujuan yang sama sesuai dengan hakikat manusia untuk menjadi pribadi yang utuh (Ipah Saripah, 2014).

Upaya bimbingan dan konseling dalam mewujudkan fungsi-fungsi pendidikan berfokus pada membantu individu untuk mengasah, menginternalisasi, memperbaiki, dan mengintegrasikan sistem nilai ke dalam perilaku mereka secara mandiri. (Putri, 2022).

Bimbingan, sebagai bagian dari upaya pendidikan, dipahami sebagai proses pemberian bantuan kepada individu untuk mencapai perkembangan diri yang optimal dalam menjalani hidup secara mandiri. Pembimbingan seorang ayah atau laki laki juga sangat dibutuhkan dalam pelayanan BK disekolah ( Taufk & Amir, 2023). Dalam konteks bimbingan, bantuan berarti memfasilitasi individu untuk mengembangkan kemampuan dalam memilih dan mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri (Tasril et al., 2019).

Kondisi perkembangan optimum adalah kondisi dinamis yang ditandai dengan kesiapan dan kemampuan individu untuk memperbaiki diri (*self-improvement*) agar dia menjadi pribadi yang berfungsi penuh (*fully-functioning*) di dalam lingkungannya (Chamdani, n.d.).

Tujuan utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah memberikan dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir individual yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang (Ipah Saripah, 2014). Namun, penerapan layanan bimbingan dan konseling yang ideal menghadapi berbagai hambatan dan kendala serius. Hambatan-hambatan ini meliputi: ketidaksesuaian tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan, orientasi bimbingan dan konseling yang masih berfokus pada masalah, penyusunan program yang belum didasarkan pada penilaian kebutuhan (*needs assessment*), kurangnya dukungan dari pejabat sekolah terhadap program

bimbingan dan konseling, pemahaman yang belum memadai mengenai paradigma kolaborasi antar profesi dalam satuan pendidikan, serta kurangnya respons positif dari peserta didik terhadap layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang berkembang di Indonesia selama ini lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif dan klerikal, seperti mengelola kehadiran dan ketidakhadiran siswa, mengenakan sanksi disiplin pada siswa yang terlambat dan dianggap nakal (Syahri et al., 2022).

### C. Syarat Manajemen Pelayanan BK di Sekolah

Untuk dapat berhasil dengan baik proses dari manajemen maka harus ada syarat-syarat manajemen yang harus dipenuhi (Hamali & SS, 2023), meliputi; 1) Harus ada pembagian kerja dalam hal ini, memiliki penafsiran kalau sesuatu pekerjaan itu apabila dibagi sesuai dengan bakat serta keahlian anggota organisasi akan lebih sukses apabila dibandingkan dengan tidak adanya pembagian kerja, 2) Kekuasaan serta pertanggung jawaban Dalam suatu organisasi wajib terdapat kejelasan tentang kekuasaan serta pertanggung jawaban antara tiap- tiap staf dalam organisasi, 3) Disiplin Seluruh lini dalam suatu organisasi wajib memiliki disiplin dengan menaati peraturan yang diresmikan, 4) Kesatuan komando Kesatuan komando perlu untuk menjaga kesimpang siuran perintah di dalam organisasi, sebab organisasi memiliki tujuan yang sama, 5) Kesatuan arah Kesatuan arah diperlukan untuk menjauhi tiap- tiap anggota memiliki tujuan sendiri- sendiri. Perintah cuma tiba dari satu orang saja, 6) Tujuan organisasi cocok dengan tujuan anggotanya Antara tujuan organisasi serta tujuan anggotanya wajib sejalan, sebab apabila ada perbandingan tujuan hingga organisasi hendak hadapi kesusahan, 7) Pemberian upah/ pendapatan Wajib didasarkan pada kebutuhan anggota organisasi serta keluarganya secara adil, 8) Sentralisasi Membagikan sesuatu cerminan kalau di dalam sesuatu organisasi membutuhkan sesuatu pemusatan tanggung jawab buat menjauhi bawahan tidak dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar, 9) Jenjang jabatan Urutan- urutan ikatan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain wajib silih bersambung. Kejelasam ikatan ini perlu untuk memastikan kearah mana seseorang harus bertanggung jawab serta ke arah jenjang mana seorang nanti di promosikan, 10) Keteraturan Keteraturan dibutuhkan supaya tidak terjalin kelambatan di dalam proses manajemen.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan proses tinjauan Pustaka (*literature review*) dengan memanfaatkan metode naratif dalam menyampaikan hasil dan pembahasannya. Pada dasarnya menggunakan proses tinjauan Pustaka (*literature review*) dengan metode naratif berarti penulis merangkum berbagai *literature* yang didapatkan agar pembahasan terkait artikel dapat lebih deskriptif.

Dalam skema pelaksanaannya, artikel yang telah publish terlebih dahulu disesuaikan dengan judul dan abstrak dengan kesesuaian tujuan artikel yang penulis

buat, sehingga setelah dianalisis, penulis akan mengkaitkan hasil dari artikel yang telah publish dengan hasil dari tujuan yang penulis buat berdasarkan judul artikel penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelurusan sistematis yang dilakukan terkait manajemen pelayanan BK di sekolah, maka didapatkan hasil pelaksanaan manajemen pelayanan BK di Sekolah secara ideal dan kenyataan yang terjadi, berdasarkan Tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1. Konsep Ideal dan Kenyataan Manajemen Pelayanan BK di Sekolah.**

<b>Sub Topik</b>	<b>Ideal</b>	<b>Kenyataan</b>
<b>Konsep</b>	konsep manajemen hingga pelaksanaan ataupun implementasi manajemen bimbingan dan konseling ialah salah satu perwujudan sesuatu aktivitas yang sistematis tentang gimana merancang sesuatu kegiatan bimbingan dan konseling, bagaimana menggerakkan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi bimbingan dan konseling buat menggapai tujuan, mengawasi gimana aktivitas bimbingan dan konseling berjalan serta memperhitungkan aktivitas bimbingan dan koseling.	Penerapan manajemen di sekolah-sekolah sudah terlihat bagus dan berjalan sebagaimana mestinya, berperan dan melaksanakan tugasnya sesuai perannya masing-masing baik dari pihak Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran dan Guru BK beserta personil sekolah lainnya, hanya masih ada ditemukan sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru BK di Sekolah tersebut.
<b>Fungsi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Pengorganisasian</li> <li>3. Pelaksanaan</li> <li>4. Pengawasan</li> </ol>	Kenyataan dilapangan, untuk fungsi dari manajemen, sudah banyak sekolah-sekolah yang melaksanakan organisasi sekolahnya merujuk kepada fungsi POAC
<b>Syarat</b>	Untuk dapat berhasil dengan baik proses dari majemen maka harus ada syarat-syarat manajemen yang harus dipenuhi	Bagi setiap sekolah, tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda agar visi misi sekolahnya dapat tercapai dengan sebaik mungkin
<b>Organisasi dan Personalia</b>	Organisasi pelayanan bimbingan dan konseling yang hendak dibentuk pada sesuatu sekolah hendaknya	Untuk organisasi dan personalia masih belum berjalan dengan baik, salah

---

	<p>memikirkan sumber tenaga yang ada, besarnya sekolah, jumlah siswa serta jumlah guru pembimbing yang terdapat, serta gimana kualifikasi dan pangkat ataupun jabatannya bisa disesuaikan dengan pengaturan ataupun pembagian tugas di sekolah.</p>	<p>satunya sumber tenaga yang tersedia tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya, ada yang sekolah tersebut seharusnya membutuhkan 4-5 Guru BK, akan tetapi kenyataan dilapngan hanya 3 Guru BK saja.</p>
<p><b>Program</b></p>	<p>Personalia melaporkan aspek inti organisasi merupakan orang- orang( personil) selaku aspek yang membentuk organisasi, sebaliknya yang tercantum aspek kerja yang memastikan berjalannya organisasi program bimbingan dan konseling adalah satuan besar atau kecil rencana kegiatan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada periode tertentu.</p>	<p>Untuk kegiatan program di guru BK, masih banyak ditemukan guru BK yang tidak paham dengan program-program BK, bahkan hal itu berasal dari guru BK yang memang benar-benar tamatan S1 BK.</p>
<p><b>Fasilitas</b></p>	<p>Untuk memastikan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling berjalan dengan optimal, selain membentuk dan mengatur organisasi dengan baik serta menugaskan tenaga personel sesuai kemampuan masing-masing, juga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tersebut.</p>	<p>Untuk beberapa sekolah, hal dominan yang ditemukan adanya sekolah yang tidak memperhatikan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, padahal dapat diketahui bahwa BK termasuk dalam salah satu tonggak sekolah dapat berdiri dan berjalan dengan baik</p>
<p><b>Akuntabilitas</b></p>	<p>Akuntabilitas program merujuk pada tanggung jawab terkait hasil dari kegiatan bimbingan dan konseling yang telah dilakukan. Ini berhubungan erat dengan rencana program yang telah dibuat sebelumnya dan juga mencerminkan akuntabilitas proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Untuk akuntabilitas, ada beebraapa sekolah yang personil Guru BK tidak mampu mempertanggung jawabkan semua kegiatan Bimbingan dan Konselingnya di sekolah.</p>

---

---

<b>Kepengawasan</b>	tersebut. Pengawasan manajemen merupakan upaya terstruktur untuk menetapkan standar pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan, merancang sistem umpan balik, dan membandingkan kegiatan aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.	Untuk kepengawasan, bukan hanya bagi BK bagi guru-guru lain terkait kepengawasan diperhatikan oleh pimpinan sekolah.
<b>Pengembangan</b>	Pengembangan melibatkan berbagai metode atau pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana guru dan staf sekolah lainnya dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka, serta berkembang secara profesional selama masa kerja mereka.	Kebanyakan sekolah-sekolah terus mengembangkan sumber tenaga manusia berupa Guru untuk terus meng-upgrade diri dengan cara mengikuti pelatihan atau seminar-seminar

---

Prayitno (dalam Fernando & Rahman, 2016) Dikatakan bahwa program bimbingan dan konseling adalah rencana kegiatan layanan serta kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, baik dalam skala besar maupun kecil. Program-program ini merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem bimbingan dan konseling di sekolah. Penyusunannya harus memperhatikan pola umum bimbingan dan konseling serta kondisi yang ada di lapangan. (Syahri, 2023). etiap institusi pendidikan atau sekolah perlu menyusun rencana program bimbingan dan konseling sebagai bagian dari keseluruhan program sekolah. Rencana ini akan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di masing-masing sekolah.

Secara operasional, guru pembimbing dan koordinator bimbingan adalah pelaksana utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Namun, diharapkan seluruh personel sekolah juga turut berperan agar program bimbingan dapat berjalan dengan efektif. (Tursina et al., 2024). Personel yang terlibat meliputi: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, kepala dinas pendidikan, komite sekolah, koordinator bimbingan dan konseling (BK), guru praktik, pengawas BK, siswa, staf administrasi, orang tua siswa, tata usaha, dan petugas kebersihan.

Oleh karena itu, penting untuk memperjelas manajemen pelayanan BK di sekolah agar guru BK atau konselor dapat menjalankan struktur organisasi pelayanan BK sesuai dengan tujuan dan visi misi sekolah.

Agar hal tersebut dapat tergambar jelas bagi Guru BK/ Konselor, maka hal tersebut telah dirangkum dalam konsep atau point penting pelaksanaan manajemen pelayanan BK di sekolah berdasarkan gambar 1 dibawah ini.





**Gambar 1. Konsep Manajemen Pelayanan BK di Sekolah**

## SIMPULAN

Pada prinsipnya manajemen memuat makna segala upaya menggerakkan individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam mendayagunakan sumber daya dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan. Apabila diterapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya (tenaga, dana, sarana/prasarana) dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan. Manajemen bimbingan dan konseling yang terarah dan sistematis merupakan manifestasi dan akumulasi pelayanan bimbingan dan konseling sehingga merupakan salah satu indikator kerja konselor. Selanjutnya dengan manajemen bimbingan dan konseling yang sistematis dan terarah yang baik pada gilirannya akan memberikan panduan pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling sekaligus menghilangkan kesan bahwa konselor bekerja secara insidental dan bersifat kuratif semata-mata.

## SARAN

Artikel ini memuat terkait fenomena yang terjadi tentang manajemen pelayanan bimbingan dan konseling yang terjadi di sekolah, dengan membandingkan idealnya pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling di sekolah, maka dari itu dalam pelaksanaannya artikel ini masih terbatas teori secara praktik terkait manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, oleh sebab itu bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami lebih jauh terkait sistem pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling di Sekolah, dapat dilakukan dengan menggunakan praktik dalam mengidentifikasi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afny, D. N. (2023). *Analisis Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengembangkan Potensi Diri Peserta Didik di MAN Pinrang*. IAIN Parepare.
- Asni, A., Dasalinda, D., & Chairunnisa, D. (2024). Penerapan Fungsi Manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, And Controlling) dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(1), 357–364.
- Chamdani, M. (n.d.). Problem Analysis of Elementary School Children as Planning Assesment Program Guidance and Counseling. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 2(1), 310–314.
- Fernando, F., & Rahman, I. K. (2016). Konsep Bimbingan Dan Konseling Islam Solution Focused Brief Therapy (SFBT) Untuk Membantu Menyembuhkan Perilaku Prokrastinasi Mahasiswa. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(2), 215–236.
- Habsy, B. A., Irsu, A. F., Mutaqin, M. A., Pratanti, A. D., Sabella, A. S., Putratama, W. L., & Putricia, A. R. (2024). Landasan Historis Pendidikan Indonesia: dari Masa Penjajahan Sampai Kemerdekaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4672–4685.
- Hamali, A. Y., & SS, M. M. (2023). *Pemahaman manajemen sumber daya manusia*. Caps.
- Hidayat, W., Suryana, Y., & Fauziah, F. (2020). Manajemen Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 14(2), 346–354.
- Manik, N. S. Z., Novita, W., Nurjannah, N., & Arsini, Y. (2023). MANFAAT MANAJEMEN BIMBINGAN KONSELING. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 1(2), 77–87.

- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Mutia, S. (2021). Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan Dan Konseling Disekolah. *Intelektualita*, 7(01).
- Putri, Y. R. (2022). Implementasi konseling individu dengan teknik exception dalam mencegah perilaku bolos di SMK Muhammadiyah petanahan [The implementation of individual counseling with exception technique in preventing truancy behavior in SMK Muhammadiyah Petanahan]. *Journal of Contemporary Islamic Counselling*, 2(1), 1–12.
- Setiawan, H. R. (2021). *Manajemen Peserta Didik:(Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan* (Vol. 1). umsu press.
- Sinaga, M. H. P., Qurrata, K., & Andini, V. (2022). Pola pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4(1), 110–116.
- Siraj, S. P. (2022). *Profesi pendidikan: tinjauan teoritik manajemen pengembangan profesionalisme guru*. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA.
- Sumarto, S. (2024). Manajemen Konseling Sekolah dalam Mengatasi Masalah Siswa di Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Hidayatullah Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Pendidikan Guru*, 5(1).
- Syahri, L. M. (2023). Existential Logotherapy in Improving the Meaningfulness of Life of Pre-Prosperous Family Students. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 12(3).
- Syahri, L. M., Mudjiran, M., Sukma, D., & Syahrial, S. (2022). KESIAPAN KONSELOR DALAM PROSES KONSELING YANG BERHASIL. *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 2(2), 82–91.
- Taufik, T. (2021). Implementing group counseling to change student's insight pattern about learning in the COVID-19 pandemic. *JELITA*, 2(1), 59-68.
- Taufik, Amir, 2023. Kontribusi Ayah Dalam Pembimbingan Terhadap Perilaku Moral Anak. <https://jurnal.stkipmb.ac.id/index.php/jubikops/article/view/438>
- Tasril, V., Wijaya, R. F., & Widya, R. (2019). Aplikasi Pintar Belajar Bimbingan Dan Konseling Untuk Siswa Sma Berbasis Macromedia Flash. *Jurnal Informasi Komputer Logika*, 1(3).
- Tursina, S. R., Karneli, Y., Hariko, R., & Syahri, L. M. (2024). Relationships In Counseling A Literature Review: Characteristics And Dimensions Of Relationships In Counseling. *International Journal of Asian Education and Psychology*, 1(1).
- Umami, F. (2022). Peran Guru BK dalam Manajemen Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Education & Learning*, 2(2), 38–43.

Zamroni, E., & Rahardjo, S. (2015). Manajemen bimbingan dan konseling berbasis permendikbud nomor 111 tahun 2014. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 1(1).

Zulkarnain, W. (2022). *Manajemen layanan khusus di sekolah*. Bumi Aksara.